TAFSIR AYAT-AYAT KE-PANCASILA-AN

¹Agus Tohawi

agustohawi17@gmail.com

Dosen Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

²Suwandi

suwandi.ardiansyah@gmail.com

Pascasarjana Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

Abstrak: Indonesia merdeka berkat perjuangan para pahlawan yang memiliki latar belakang agama berbeda-beda. Jika salah satu dari beragam agama tersebut mengedapankan egonya, maka tidak akan terjadi kesepakatan. Berkat kesepakatan itulah Indonesia memiliki dasar Pancasila yang dapat mempertemukan seluruh elemen untuk bersama-sama membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Secara tersurat maupun tersirat, sesungguhnya Pancasila memiliki dasar dari al-Qur'an. Artikel ini akan membahas penafsiran ayat-ayat ke-Pancasila-an dari sudut pandangan tafsir tematik. Kesimpulan artikel ini adalah: Sila pertama memiliki dasar dari surah al-Ikhlāṣ ayat pertama dan al-Baqarah ayat 163 tentang ke-Esaan Tuhan; Sila kedua memiliki dasar dari surah Al-Shūra ayat 15 (*supaya berbuat adil antar sesama*) dan Al-Nahl ayat 90 (*adil dan ihsan*); Sila ketiga memiliki dasar dari surah Ali 'Imrān ayat 103 (*supaya bersatu padu dan jangan bercerai-berai*) dan Al-Hujurāt ayat 10 (*antar sesama adalah saudara*) dan 13 (*supaya saling memahami satu sama lain*); Sila keempat memiliki dasar dari surah Al-Baqarah ayat 269 (*hikmat*), Ali 'Imrān ayat 159 (*musyawarah*), Tāhā ayat 30-32 (*asas perwakilan*), Al-Nisā' ayat 58 (*asas perwakilan*); Sila kelima memiliki dasar dari surah Al-Mā'idah ayat 8 (*asas keadilan*) dan al-Tawbah ayat 60 (*asas keadilan yang memihak kepada rakyat kecil*).

Kata kunci: Tafsir tematik, Pancasila.

Pendahuluan

Penentuan dasar negara Indonesia berupa Pancasila ini telah melalui tahapan sejarah yang sangat panjang. Umat Islam pada masa itu juga telah mengupayakan ego-teologisnya untuk masuk ke dalam ranah dasar negara. Namun sejarah membuktikan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena unsur warga negara yang beragam. Adanya kalimat “Dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” dalam sila pertama merupakan salah satu contoh yang tidak dapat diterima oleh kalangan non Muslim. Jika hal itu dipaksakan, maka Indonesia wilayah timur akan lepas dari Indonesia. Dengan pertimbangan bersama, akhirnya kalimat tersebut di *delete*. Selain itu, para pahlawan yang memperjuangkan bangsa ini juga bukan dari kalangan muslim saja. Dengan demikian, seluruh elemen harus dirangkul demi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada akhirnya, Pancasila dirumuskan dan disahkan menjadi lima sila, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini kemudian memiliki simbol masing-masing. Sila pertama memiliki simbol satu bintang. Sila kedua memiliki simbol rantai. Sila ketiga memiliki simbol pohon beringin. Sila keempat memiliki simbol kepala banteng dan; Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas.

Metode Penelitian (Tafsir Tematik)

Tafsir tematik dapat dibagi menjadi dua, yaitu tematik dari dalam al-Qur'an dan dari luar al-Qur'an. Tematik yang diambil dari dalam al-Qur'an yaitu menyangkut kata-kata yang tersurat di dalam al-Qur'an (*sariḥ*). Sedangkan tafsir tematik dari luar al-Qur'an, yaitu tema atau kata-kata yang tidak tertulis secara langsung di dalam al-Qur'an namun substansinya disinggung oleh al-Qur'an.¹

Sedangkan penelitian ini menggunakan dua pendekatan tersebut sebab, Pancasila memiliki lima sila yang terstruktur dan rapi kemudian dicari ayat-ayat yang berkaitan tentang kelima sila tersebut. Dari lima sila tersebut ada yang ditemukan ayat secara tersurat dan ada pula ayat yang tersirat. Penyusunan runtutan penafsiran di dalam artikel ini menggunakan barometrik urutan dari Pancasila, mulai dari sila pertama hingga terakhir (kelima). Penyusunan ini dilakukan atas pertimbangan kemudahan di dalam mencari legitimasi ayat-ayat yang membahas tentang Pancasila.

Pembahasan

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini memiliki dasar di dalam al-Qur'an, surah Al-Ikhlaṣ [112] ayat pertama. Allah berfirman:

¹ Abdur Rohman, *Tafseer Verses of Diversity*, dalam Proceeding "Medorasi Islam Aswaja untuk Perdamaian Dunia" IAIFA Pare Kediri, vol. 1, 2019, 158.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Katakanlah (Wahai Muḥammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.

Konteks ayat ini membicarakan tentang perdebatan Nabi dengan orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya. Berdasarkan riwayat dari Aḥmad, Tirmidhī, dan Ibnu Jarīr dari Ubay bin Ka‘ab menjelaskan bahwa orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah saw. tentang nasab ‘Tuhannya? Kemudian Allah menurunkan *qul huwa Allāhu aḥad* (Katakan, ‘Tuhan itu Esa). Orang-orang musyrik ingin memperdebatkan tentang ketuhanan di dalam Islam. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa, ke-Esaan Tuhan itu menegaskan unsur-unsur yang dipertanyakan oleh orang-orang musyrik tersebut. Pertanyaan mengenai nasab Tuhan, secara eksplisit dinyatakan tertolak karena jawaban Tuhan itu Esa, berarti meniadakan nasab. Yang memiliki nasab pasti mati, yang mati pasti akan meninggalkan warisan. Sedangkan Allah tidak mati dan tidak dapat diwarisi.² Sedangkan riwayat dari Ibnu ‘Abbās menyatakan bahwa ada salah seorang Quraish yang menanyakan kepada Nabi perihal Allah. “Dari apakah ia, emas atau perak? Kemudian Allah menurunkan surah al-Ikhlāṣ ini.”³

Dasar kedua mengenai ke-Esaan Tuhan terdapat di dalam surah al-Baqarah [2] ayat 163:

² Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhayfī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqāḍ wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma‘āṣir, 1418), vol. xv, 463.

³ Abū Ṭāhir bin Ya‘qūb al-Fayrūzī Abadī, *Tamwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibnī ‘Abbās* (Kairo: Shirkah al-Quds, 2007), 604.

وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Abū al-Layth al-Samarqandī di dalam kitabnya menjelaskan bahwa Tuhan kamu sekalian adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan asumsi orang-orang Majusi yang memiliki sebutan al-Manūwiyah, yang dipimpin oleh Mānī, ia menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Siang dengan malam, gelap dengan terang, panas dengan dingin, kebaikan dengan keburukan, bahagia dengan sedih, dan sesuatu yang patut atas sesuatu itu, tidak patut disandarkan kepada yang lain, maka barangsiapa menciptakan kebaikan dan cahaya, maka ia tidak patut menciptakan keburukan dan kegelapan.

Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai bantahan atas asumsi mereka, bahwa Allah adalah Tuhan Yang Esa, yang mana semua hal disandarkan kepada-Nya.⁴ *Khiṭab wa ilābukum ilāhun wāḥid* ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang Islam dan Ahli Kitab saja. Pada dasarnya, secara naluriah-alamiah, seluruh manusia sebenarnya hanya mengakui satu Tuhan. Oleh karena itu, sila pertama “Ketunanan Yang Maha Esa” disetujui oleh seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia.

⁴ Abū al-Layth Naṣr bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Samarqandī, *Baḥr al-ʿUlūm* (al-maktabah al-Shmāmīlah), QS. Al-Ikhlāṣ [112], 1.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua adalah “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Asas keadilan di dalam sila ini dapat ditemukan di dalam surah Al-Shūra [42] ayat 15:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ^ط وَاسْتَقِمْ^ط كَمَا أُمِرْتَ^ط وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ^ط وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ^ط اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ^ط لَنَا أَعْمَلُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ^ط لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ^ط اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ^ط

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali".

Mahal al-shahād ayat ini yang membicarakan persoalan keadilan terdapat pada redaksi *wa umirtu li a'dala baynakum* (dan aku (Muhammad) diperintahkan supaya adil kepadamu). Maksud keadilan di dalam ayat ini menurut mufasir dari Cordoba Spanyol, al-Qurṭubī adalah “keadilan dalam segala hal, dan ada pula yang menyatakan keadilan hukum”.⁵ Seorang mufasir ahli hukum tata negara dari Irak, al-Māwardī menyatakan bahwa keadilan yang

⁵ Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr bin Farḥ al-Anṣārī Shams al-Dīn al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān* (Riyāḍ: Dār ‘Alim al-Kutub, 2003), juz xvi, 13.

dimaksud di dalam ayat ini ada dua makna, yaitu keadilan dari segi hukum dan keadilan dari segi dakwah.⁶ Kata ‘adil’ di dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah bahasa serapan dari bahasa Arab ‘*adl*’. Kata ‘adil’ (dalam bahasa Indonesia) ketika dikembalikan ke dalam al-Qur’an, setidaknya ada dua makna, yaitu *al-‘adlu* dan *al-qist*. Kedua kata ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama bermakna adil. Namun perbedaan dari dua diksi ini dapat ditemukan di dalam surah al-Nisā’ [4]:4 yang menjelaskan tentang poligami. Di dalamnya ada kata *an lā tuqsitū fī al-yatāmā* dan *an lāta ‘dilu fawāhidah*. Makna dari perbedaan redaksi tersebut adalah: *qist* digunakan oleh al-Qur’an untuk menyatakan keadilan dalam ranah kuantitatif. Sedangkan *al-‘adl* lebih menekankan keadilan psikologis dan sosial.⁷

Asas keadilan yang kedua dijelaskan di dalam surah Al-Nahl [16] ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

⁶ Abū Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-Uyūn* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), vol. V, 199.

⁷ Abdur Rohman “Poligami” dalam jurnal Agenda, IAIN Batusangkar, vol. 2 nomor 1 Juli-Desember, 2019, 3-4.

Al-Samarqandī menjelaskan bahwa makna *al-‘adl* di dalam ayat ini adalah mentauhidkan Allah dan *ihsān* adalah berbuat baik kepada sesama. Selain itu, lanjutan ayat ini juga memerintahkan untuk menjaga tali silaturahmi, menjauhkan diri dari segala perkara yang dapat menimbulkan perbuatan zina, kemungkaran (perkara yang tidak disyariatkan dalam Islam dan terancam siksa neraka) serta larangan berbuat permusuhan atau sombong.⁸ Sedangkan Ibnu Kathīr lebih luas lagi di dalam memaknai kata *‘adl* tersebut. Ia menyatakan bahwa *‘adl* adalah *al-qist wa al-mawāzīnah*⁹ (adil dan setara).

Sementara Zamakhsharī memaknai kata tersebut dengan menunaikan segala kewajiban kepada Allah.¹⁰ Dalam arti, segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jika seorang hamba menunaikan kewajiban memberikan zakat, maka zakat itu akan berdampak kepada stabilitas sosial dan dapat menurunkan angka ketimpangan. Jika seorang hamba menunaikan kewajibannya mencari nafkah untuk keluarga, maka dia sudah melaksanakan atau menggugurkan kewajiban agama dan meringankan beban keluarganya.

Jika mencermati makna keadilan yang telah dijelaskan oleh para mufasir di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan

⁸ Al-Samarqandī, QS. Al-Nahl [16]:90.

⁹ Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm* (Kairo: Dār Ṭaybah, 1999), vol. iv, 595.

¹⁰ Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf ‘an Ḥaqā’iq al-Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujuh al-Ta’wīl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1407), vol. ii, 628.

yang dimaksud ada yang bersifat spesifik dan ada pula yang bersifat umum. Keadilan yang spesifik adalah keadilan dalam ranah hukum. Hukum seharusnya tidak memandang bulu, dan seringkali disimbolkan dengan orang yang matanya tertutup dengan membawa timbangan. Itu artinya, pihak penegak hukum harus menerapkan asas keadilan bagi siapapun tanpa melihat siapa yang sedang melanggar hukum tersebut. Keadilan kedua dalam ranah vertikal dan horizontal. Dalam ranah vertikal, seseorang yang melakukan kewajiban agama juga dianggap adil. Dalam konteks kenegaraan, orang yang melakukan ibadah shalat adalah adil dari segi akidah, sebab ia sudah memposisikan diri sebagaimana mestinya, yaitu sebagai seorang hamba yang taat beragama.

Begitu juga dalam agama lain yang melaksanakan ajaran agama dianggap sudah adil dari sudut pandang agama masing-masing. Sedangkan keadilan dalam ranah horizontal lebih familiar disebut dengan *ḥabl min al-nās* (hubungan antar sesama manusia). Di dalam Islam sangat banyak ajaran yang memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik terhadap sesama. Salah satu bentuk kewajiban untuk mempedulikan sesama adalah dengan cara menunaikan zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang kaya untuk mendermakan sebagian hartanya kepada golongan strata sosial yang paling bawah. Jika saja orang-orang kaya di negara ini memiliki perhatian besar terhadap lingkungan masing-masing, maka proses pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif. Jika dicermati lebih mendalam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan di sini dapat dimaknai keadilan

ekonomi, keadilan hukum dan keadilan diri seorang hamba dalam menempatkan posisinya di hadapan Tuhan. Itulah dasar penafsiran al-Qur'an yang dapat mempertemukan dengan sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

3. Persatuan Indonesia

Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, dan budaya. Perbedaan ini jika tidak dipupuk dengan baik, akan berpotensi menjadi konflik yang dapat memecah-belah bangsa. Oleh karena itu, di dalam sila yang ketiga ini dijelaskan tentang "Persatuan Indonesia". Asas persatuan juga diajarkan al-Qur'an di dalam surah *Āli 'Imrān* [3] ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا
حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Konteks ayat ini membicarakan tentang dua suku, Aus dan Khazraj. Pada saat mereka telah masuk Islam, suatu hari mereka membicarakan masa lalunya, yang sering berperang dan bermusuhan, karena teringat kembali masa lalu yang buruk itulah, bincang-bincang mereka menjadi memanas dan hampir saja terjadi pertikaian. Atas peristiwa inilah ayat tersebut turun.¹¹ Masing-masing dari keduanya diperintahkan oleh Allah supaya *muhāsabah* diri. Islam datang telah mendamaikan mereka dan mempersatukan mereka atas dasar iman dan persaudaraan. Padahal sebelumnya mereka dalam kekafiran dan permusuhan.

Al-Qur'an bukanlah kitab yang diturunkan kepada suku Aus dan Kahzraj saja. Oleh karena itu kedua nama tersebut tidak disebutkan oleh al-Qur'an, karena al-Qur'an untuk seluruh umat manusia. Termasuk untuk bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku dan agama. Allah telah mempersatukan Aus dan Khazraj dalam satu iman juga dapat dikontekstualisasikan sebagai persatuan bangsa Indonesia. Atas dasar Indonesia, para penduduk yang beragam di dalamnya bisa bersatu padu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada penduduknya agar bersatu dan menjauhi perpecahan. Persatuan akan menambah kekuatan dan perpecahan akan menyebabkan kelemahan. Ibarat sebuah lidi, jika hanya satu, maka akan kesulitan membersihkan dedaunan. Akan tetapi jika lidi-lidi tersebut diikat dan disatukan, maka dedaunan yang berserakan itu akan mudah dibersihkan. Itulah analogi

¹¹ Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Taḥṣīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'āshir, 2016), vol. ii, 347.

persatuan. Semakin besar suatu bangsa, maka semakin besar pula kekuatannya. Semakin kecil suatu bangsa, maka semakin kecil pula kekuatannya.

Ayat kedua yang menjelaskan tentang asas persatuan adalah surah al-Hujurāt [49] ayat 10 dan 13:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ^{١٢} وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Secara eksplisit ayat ini membicarakan tentang persaudaraan antar sesama umat Islam yang didasarkan persamaan se-iman, yaitu sama-sama iman kepada Allah. Di dalam ayat ini mereka digambarkan seperti halnya saudara. Pemahaman demikian karena redaksi ayat *innamā al-mu'minūna ikhwatun* adalah *tashbīh* *baligh* yang membuang huruf *tashbīh*-nya. Jika ditampakkan, maka redaksinya adalah *innamā al-mu'minūna ka al-ikhwati*.

Di dalam hadis juga disebutkan bahwa orang mukmin yang satu dengan mukmin lain bagaikan bangunan yang saling menguatkan.¹² Ada pula perumpamaan lain yang mengibaratkan seperti halnya satu tubuh. Apabila yang satu sakit, maka bagian

¹² Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Kairo: Dār al-Shu'ab, 1987), vol. viii, 14.

tubuh yang lain juga ikut merasakan.¹³ Jadi, sesama muslim tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh bertengkar apalagi bercerai-berai. Persatuan harus dikuatkan karena kekuatan negara ada pada persatuan. Jika umat Islam yang terbesar di negara ini bercerai-berai, maka perdamaian dan kemakmuran akan semakin jauh.

Dalam konteks bernegara, telah lazim didengar persaudaraan atas dasar satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda merupakan wujud dari kecintaan warga negaranya kepada bangsa ini meskipun wujud dari kemerdekaan belum dirasakan pada saat itu. Oleh karenanya, jika seseorang tidak dapat bersatu atas nama agama, minimal dia bisa bersatu atas nama negara, Indonesia. Implementasi ini sangat kuat dirasakan oleh mereka yang sedang ke luar negeri, baik dalam misi belajar maupun menjadi TKI. Lebih jauh dari itu, seorang pakar tafsir nusantara menyatakan bahwa “Jika kita tidak dapat disatukan atas dasar iman, maka kita bisa disatukan atas dasar kemanusiaan”.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِّتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹³ Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayri, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t. th), vol. viii, 20.

Meskipun al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, akan tetapi *kehiṭāb* ayat ini ditujukan kepada umat manusia. Itu artinya, dalam konteks ini yang diuru bukan hanya umat Islam, tetapi seluruh umat manusia. Baik yang ada di Indonesia, Amerika, Inggris dan lain sebagainya. Baik orang yang beragama Kristen, Yahudi, Hindu, Budha atau yang lainnya. Semua masuk dalam *kehiṭāb* ini.

Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa penciptaan manusia itu memang berbeda-beda. Perbedaan eksplisit yang dijelaskan oleh al-Qur'an adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta perbedaan bangsa dan suku. Allah menciptakan perbedaan tersebut supaya umat manusia saling mengerti dan memahami. Mengerti akan ke-khasan masing-masing orang dan memahami tentang budaya dan agama mereka. Secara tidak langsung, ayat ini juga menjadi dasar dari ilmu antropologi yang memotret manusia dan budayanya dari sisi ke-khasan mereka, bukan dari kacamata orang lain, dan orang lain harus mengerti dan memahami budaya setempat.

Penutupan ayat ini menegaskan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang kuat, bukan kaum laki-laki, bukan orang yang berkulit putih dan bukan pula barometer yang lain, barometernya adalah sama, yaitu ketundukan dan ketaatan kepada perintah Allah. Jadi, di dalam hal ini semua memiliki kesempatan dan porsi yang sama dan potensi yang sama pula.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat, Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan, Perwakilan

Asas pertama dalam sila keempat adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat”. Ayat al-Qur’an yang menyinggung persoalan ini terdapat di dalam surah al-Baqarah [2] ayat 269 sebagai berikut:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan banya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

Konteks ayat ini membicarakan tentang Muḥammad yang diberi hikmah oleh Allah berupa kenabian, kemampuan menafsirkan al-Qur’an, memiliki tutur kata yang halus dan fasih, memiliki pandangan yang sangat tajam dan berbagai kelebihan lainnya. Orang yang diberi hikmah oleh Allah berarti dia mendapatkan banyak kebaikan.

Dalam konteks kenegaraan, ayat di atas memang tidak *saklek* membicarakan persoalan yang sama dengan sila keempat tersebut. Akan tetapi, redaksi hikmat memang diambil dari bahasa Arab dan bahasa Arab merujuk kepada al-Qur’an. Oleh karena itu, pemaknaanya yang pertama harus dikembalikan ke sana.

Kata *hikmah* di dalam bahasa Arab saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maknanya adalah bijaksana. Di dalam

Asmā' al-Hsna terdapat salah satu nama *al-Hakīm* yang diterjemahkan dengan Maha Bijaksana. Jika ada seorang murid yang melanggar aturan sekolah yang seharusnya dihukum dengan hukuman yang berlaku, akan tetapi si guru tersebut mengganti dengan hukuman yang lain atas pertimbangan 'si murid sangat mudah putus asa'. Bisa jadi, jika guru tersebut mengambil tindakan tegas atas pelanggaran tersebut, maka murid tersebut putus sekolah. Oleh karena itu, kepekaan atas pelanggaran itu adalah si guru menghukum dengan bentuk lain supaya si murid tidak putus sekolah dan melanjutkan sekolahnya, sembari memperbaiki kesalahannya tadi. Itulah keputusan yang bijaksana. Jadi, tipikal seperti itulah pemimpin yang diharapkan dalam Pancasila. Dia memiliki kepekaan tingkat tinggi dan memiliki pengetahuan yang luas tentang rakyatnya sehingga bisa mengambil keputusan yang bijaksana.

Asas kedua dalam sila keempat mengenai "permusyawaratan" memiliki dasar dari surah *Āli 'Imrān* [3] ayat 159, Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Koteks ayat ini membicarakan tentang kebijakan Rasulullah kepada penduduk Madinah. Di dalamnya – selain umat Islam yang taat – juga ada orang-orang munafik yang ingin melemahkan semangat umat Islam untuk berperang. Namun karena ada omongan-omongan dari orang-orang munafik yang melemahkan semangat umat Islam, maka dibentuklah musyawarah tentang masalah perang dan urusan keduniawian lainnya seperti halnya urusan politik, ekonomi dan sebagainya.

Maḥal al-shahīd yang dapat dijadikan dasar tentang ‘Permusyawaratan’ adalah redaksi *wa shāwirhum fī al-amr* (dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu). Meskipun Rasulullah adalah pemimpin yang memiliki hak prerogatif untuk memutuskan sebuah perkara, akan tetapi melibatkan orang lain untuk bermusyawarah demi kemaslahatan bersama adalah perintah Allah yang harus dijalankan.

Selain asas permusyawaratan, asas perwakilan juga terdapat di dalam al-Qur’an. Di dalam surah Ṭāhā [20] ayat 30-32, Allah berfirman:

هَرُونَ أَخِي ۖ أَشْدَدُّ بِهِ أَزْرَى ۚ وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي ۚ

(yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan Dia kekuatanku, dan jadikanlah Dia sekutu dalam urusanku.

Konteks ayat di atas menceritakan tentang nabi Hārūn dan Mūsa. Sedangkan yang mendapatkan kitab Tawrat adalah nabi Mūsa. Salah satu tugas seorang rasul adalah menyampaikan wahyu. Namun nabi Mūsa memiliki kelemahan dalam melafalkan ayat-ayat Allah. Konon, saat masih kecil ia memakan bara api sehingga lidahnya tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan fasih. Atas kekurangan inilah nabi Mūsa memohon kepada Allah agar diangkat seorang wakil, dan nabi Hārūn adalah orang yang diajukan oleh nabi Mūsa kepada Allah. Permohonan itu dikabulkan dan jadilah nabi Hārūn sebagai ‘juru bicara wahyu’.

Dalam konteks kenegaraan, seseorang tidak mungkin mengurus bangsa ini sendirian. Dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, maka satu sama lain harus saling bahu-membahu untuk memajukan bangsa. Dari level yang tertinggi, Presiden misalnya, dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh para menteri yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengemban amanah tersebut. Dalam konteks kabupaten, Bupati mengangkat para camat untuk menjadi kepanjangan tangan atas berbagai kebijakan yang diemban oleh bupati.

Selain itu, suara rakyat juga dapat disalurkan melalui jalur pemilihan umum secara demokratis. Mereka memiliki hak penuh dalam pemilihan umum untuk menentukan presiden, gubernur, bupati atau walikota, DPR, DPD, DPRD dan sebagainya. Semua itu 100% di tangan rakyat. Oleh karenanya, dibutuhkan kedewasaan politik agar demokrasi yang mahal ini bisa menjadi kontestasi politik yang jujur dan bersih dari unsur-unsur *money*

politic yang dapat menciderai tujuan luhur tersebut. Semua elemen tidak dapat dikesampingkan. Jika ada pemerintah yang “nakal” dan bisa mempermainkan rakyatnya, maka dalam periode yang kedua, risikonya rakyat tidak akan memilihnya lagi. Dengan demikian akan tercipta simbiosis-mutualism antara rakyat dan pemerintah.

Selain ayat di atas, asas perwakilan juga terdapat di dalam surah Al-Nisā’ [4] ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Konteks ayat ini membicarakan tentang kunci Ka'bah yang dipegang oleh Uthmān bin Ṭalhah. Saat peristiwa *Fath Makkah*, konon ‘Ali bin Abī Ṭālib meminta kunci itu dari Ṭalhah. Namun ada wahyu turun supaya kunci itu diberikan kepada ahlinya. Saat itu, orang yang berhak memegang kunci tersebut adalah keturunan dari Qusay bin Kilab. Pada masa Rasulullah, jabatan tersebut dipegang oleh Uthmān bin Ṭalhah sehingga Nabi memerintahkan agar kunci itu diserahkan kepadanya, meskipun pernah diminta oleh sanak saudaranya sendiri. Selain itu, ayat di atas juga memerintahkan berbuat adil kepada siapapun. Nabi tidak memihak Ali meskipun ia adalah sanak saudara sendiri, tetapi Nabi justru

memihak kepada Uthmān bin Ṭalhah yang *notabene* orang jauh, atas dasar keadilan, bukan kekerabatan.

Al-Qur'an bukanlah kitab yang berhenti kepada kasus-perkasus. Jika hanya merujuk suatu kasus tertentu, maka hal ini disebut dengan *al-‘ibrah bi khusuṣ al-sabab lā bi ‘umūm al-lafẓ*. Akan tetapi ada sudut pandang kedua, yaitu *al-‘ibrah bi umum al-lafẓ lā bi khusuṣ al-sabab*. Dalam konteks kenegaraan, kita harus menggunakan kaidah yang kedua, yaitu dengan keumuman lafal. Ayat ini secara umum memerintahkan kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya untuk menyerahkan segala urusan kepada ahlinya. Dalam konteks pemilihan presiden, jika kita tidak dapat memegang beban berat itu, maka kita harus mewakilkan orang lain yang lebih kompeten dalam bidangnya. Begitu juga dengan pemilihan-pemilihan pemimpin yang lain, yaitu kita harus tahu diri kalau kita tidak mampu atau belum mampu sehingga wajib memilih pemimpin yang dininlai mumpuni dalam urusannya. Bukankah memilih pemimpin itu menurut pakar hukum tata negara pertama di dalam Islam, al-Māwardī, hukumnya wajib?¹⁴

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Presiden Joko Widodo dalam salah satunya sambutannya pernah menyatakan bahwa aspek paling berat dalam implementasi Pancasila adalah mewujudkan sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ia menyampaikan bahwa

¹⁴ Abū Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1960), 1.

ketimpangan sosial yang sangat mencolok terjadi di Indonesia timur. Oleh karena itu, dalam pemerintahannya harus memprioritaskan Indonesia timur. Presiden juga memberikan contoh riil, mengenai harga BBM yang mahalnya lebih dari 10 kali lipat harga normah. Begitu juga dengan harga semen dan berbagai kebutuhan lain. Penyebab dari mahalnya barang tersebut karena transportasi yang ada di sana kebanyakan melalui jalur udara. Untuk sementara waktu, negara harus hadir dan memberikan subsidi bagi barang-barang yang terlampau mahal agar rakyat Indonesia timur bisa menikmati harga yang sama dengan tempat yang lain. Untuk merealisasikan keadilan sosial jangka panjang, pemerintah harus membangun jalur darat yang memadahi agar wilayah-wilayah terpencil dapat dijangkau dan roda ekonomi cepat berkembang. Bukan sebaliknya, menunggu ekonominya tumbuh dan infrastruktur baru dibangun. Itu hanyalah contoh kecil dari ketimpangan sila kelima yang belum terealisasi dengan baik.

Konsep keadilan sosial juga memiliki asas dari al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surah Al-Mā'idah [5] ayat 8 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۚ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kata *qawwāmīn* di dalam ayat ini memiliki makna ‘mendirikan keadilan dengan konsisten’. Tidak dibenarkan ada keadilan di dalam satu waktu namun tidak di tegakkan di waktu yang lain. selain itu, umat Islam kelak akan menjadi saksi dihadapan Allah atas sikap adil itu. Jadi, secara langsung Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menjadi saksi atas keadilan itu sendiri. Beban sebagai saksi ini tidak mudah, paling tidak ada dua kriteria yang harus dimiliki: pertama, seorang yang menjadi saksi harus membuktikan bahwa dia lebih baik daripada tersangka. Kedua, orang yang menjadi saksi adalah menjadi pengawas atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Itulah dua tugas yang dibebankan kepada orang-orang beriman.

Ayat ini dengan tegas memerintahkan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya agar selalu berlaku adil kepada siapapun. Dari segi geografis, tidak boleh ada dikotomi Indonesia timur atau barat, Jawa atau bukan Jawa. Karena itu semboyan pembangunan harus di dasarkan kepada Indonesia sentris, bukan Jawa sentris karena dengan itulah asas keadilan sosial bisa terwujud. Dari segi agama, tidak boleh ada dikotomi muslim dan non-muslim, sebab semua memiliki hak yang sama dan berjuang bersama-sama dalam mengibarkan merah-putih. Dalam redaksi *walā yajrimannakum sana ‘ānu qawmin* menggambarkan larangan Allah, bahwa tidak boleh ada kebencian yang di atas-namakan kepada suatu kelompok, baik itu kelompok

yang beda agama, beda geografis ataupun beda ras. Semua harus dipersamakan atas nama warga negara Indonesia. Jika hal tersebut dilanggar, maka secara langsung ataupun tidak langsung, ia sudah melanggar sila kelima, sekaligus melanggar perintah Allah.

Salah satu dalil tersirat di dalam al-Qur'an tentang keadilan sosial terdapat di dalam surah al-Tawbah [9] ayat 60 yang menjelaskan tentang hak-hak rakyat kecil.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya al-ṣadaqāt itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang lemah hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Konteks keadilan sosial yang ditekankan di dalam ayat ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan atau minimal mengurangi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di dalam Islam adalah dengan cara memberikan sedekah atau zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Di sinilah negara harus hadir dalam rangka untuk mengidentifikasi warganya yang berada di bawah garis kemiskinan, mengeluarkan kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan dan membuat program-program yang pro rakyat kecil.

Secara spesifik al-Qur'an menyebutkan pihak-pihak yang berhak menerimanya ada delapan golongan. *Pertama*, orang fakir yaitu orang yang sengsara hidupnya. Ia tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok. *Kedua*, orang miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. *Ketiga*, *'amil zakat*, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh pemerintah. *Keempat*, *muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. *Kelima*, untuk memerdekakan budak. *Keenam*, *gharīm*, yaitu orang yang banyak hutang untuk kepentingan perjuangan dan bukan maksiat serta tidak sanggup membayarnya. *Ketujuh*, *sabīl lillāh*, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan kebutuhan sosial lainnya, dan; *Kedelapan*, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Secara eksplisit itulah orang-orang yang dikategorikan layak mendapatkan perhatian dalam Islam. Dalam konteks kenegaraan, penulis kira tidak jauh berbeda. Artinya, mereka adalah golongan yang harus diperhatikan secara penuh oleh pemerintah agar ketimpangan sosial dari segi ekonomi ini tidak terlampaui jauh dan berlarut-larut. Jadi, sistem yang ditawarkan Islam adalah dengan cara membayar zakat bagi orang-orang kaya untuk menopang ekonomi masyarakat bawah dan menerapkan pajak untuk barang atau jasa tertentu untuk kepentingan negara. Pada intinya, keadilan sosial dari segi ekonomi harus merata dan berjalan dengan baik

melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat kecil. Pada dasarnya, mengentaskan kemiskinan bukan hanya amanah undang-undang, akan tetapi juga amanah Allah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kesimpulan

Pancasila memiliki asas yang kuat dengan al-Qur'an. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki asas di dalam surah al-Ikhlāṣ [112]:1 dan al-Baqarah [2]:163. Sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” memiliki asas dari surah al-Shūra [42]:15 tentang perintah untuk berlaku adil dan surah al-Nahl [16]:90 tentang perintah untuk berlaku adil dan *iḥsān*. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” memiliki asas dari surah Āli ‘Imrān [3]:103 yang memerintahkan agar berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai dan surah al-Ḥujurat [49]:10 mengenai persaudaraan antar sesama dan ayat ke-13 mengenai perbedaan bangsa dan suku, supaya saling memahami satu sama lain. Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” memiliki asas dari surah al-Baqarah [2]:269 tentang *ḥikmah*; Āli ‘Imrān [3]:159 tentang *permusyawaratan*; Ṭāhā [20]:30-32 tentang perwakilan dan al-Nisā’ [4]:58 tentang perwakilan sesuatu kepada ahlinya. Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki asas dari surah al-Mā’idah [5]:8 tentang keadilan dan al-Tawbah [9]:60 tentang keadilan sosial terutama yang memihak kepada rakyat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhārī (al), Muḥammad bin Ismāʿīl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah. *al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ*. Kairo: Dār al-Shuʿab, 1987.
- Fayrūzi (al) Abadī, Abū Ṭāhir bin Yaʿqūb. *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibnī ʿAbbās*. Kairo: Shirkah al-Quds, 2007.
- Ibnu Kathīr, Abū al-Fidāʾ Ismāʿīl bin ʿUmar. *Tafsīr al-Qurʾān al-Aẓīm*. Kairo: Dār Ṭaybah, 1999.
- Māwardī (al), Abū Ḥasan ʿAlī bin Muḥammad bin Ḥabīb. *al-Nukat wa al-Uyūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2012.
- , *al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1960.
- Muslim, Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qushayri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t. Th.
- Qurṭubī (al), Abū ʿAbd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr bin Farḥ al-Anṣārī Shams al-Dīn. *al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾān*. Riyāḍ: Dār ʿĀlim al-Kutub, 2003.
- Rohman, Abdur. “Poligami” dalam jurnal Agenda, IAIN Batusangkar, vol. 2 nomor 1 Juli-Desember, 2019.
- , *Tafseer Verses of Diversity*, dalam Proceeding “Medorasi Islam Aswaja untuk Perdamaian Dunia” IAIFA Pare Kediri, vol. 1, 2019.
- Samarqandī (al), Abū al-Layth Naṣr bin Muḥammad bin Ibrāhīm. *Baḥr al-ʿUlūm* (al-Maktabah al-Shāmilah).

Zamakhsharī (al), Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar. *al-Kashshaf ‘an Ḥaqā’iq al-Ghawāmiḍ al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1407.

Zuḥaylī (al), Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqāḍ wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Fikr al-Ma‘āshir, 2016.